

# Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Oneibo

Steven Douw, Yosephina Ohoiwutun\*, Nur Aedah

Program Magister Kebijakan Publik, Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi: [yossi\\_ohoiwutun@yahoo.co.id](mailto:yossi_ohoiwutun@yahoo.co.id)

## ABSTRACT:

*This study aims to identify and analyze the implementation of community empowerment policies in Kampung Oneibo, Tigi District, Deiyai Regency, with reference to Permendesa PDTT Regulation No. 21 of 2020 as a guideline for community empowerment aimed at improving the standard of living of the community, as well as the factors that support and hinder the implementation of these policies. Data collection techniques include interviews, observations, literature reviews, and documentation. Data analysis involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The implementation of community empowerment policies in Oneibo Village, Tigi District, Deiyai Regency, faces challenges in terms of communication, resources, the disposition of implementers, and bureaucratic structure, as outlined by George C. Edwards III's policy implementation theory. Communication barriers, resource limitations, and bureaucratic complexity slow down implementation, despite the potential for utilizing natural resources. Low community awareness and participation also pose challenges, but support from local leaders and stronger collaboration between the government, community, private sector, and non-governmental organizations can improve the situation. Skill training programs, infrastructure improvements, and technical assistance have had a positive impact on community well-being through increased access to resources, local capacity, and active participation in decision-making, in line with Robert Chambers' concept of empowerment.*

**Keywords:** Policy Implementation, Village Funds, Community Empowerment, Oneibo Village, Deiyai Regency

Received: 28-04-2025

Accepted: 29-05-2025

Published: 14-06-2025

## 1. PENDAHULUAN

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuahkan hasil berdampak positif terhadap pembangunan desa untuk meningkatkan partisipasi. Terkait dengan partisipasi dan partisipasi perempuan dalam pembangunan Khusus di pedesaan, cara pandangnya berbeda karena Budaya telah membentuk persepsi dan pemikiran masyarakat mengenai investasi kedudukan perempuan dalam lingkungan sosialnya. Pembangunan nyata adalah suatu proses perubahan yang terencana dan diinginkan. Dari sudut pandang ini dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah aspek perubahan, dimana perubahan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena masyarakat itu sendiri menginginkan perubahan. Karena didasarkan pada kebutuhan masyarakat

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perencanaan pembangunan adalah pembangunan yang dilakukan secara terencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, terus-menerus, dengan mengupayakan penguatan dan ketahanan terhadap perubahan kinerjanya. Sumber daya yang ada harus berpedoman pada rencana. diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembangunan. UU Desa mengatur hal ini secara signifikan Perencanaan pembangunan merupakan alat yang sangat penting Sistem pengambilan keputusan berguna untuk mempercepat pencapaian perkembangan yang baik. Sehubungan dengan implementasi UU No 23 Tahun 2014 Terkait dengan Desa, mengatur tentang tata cara Pemerintahan Desa, pengambilan keputusan, dan pengamanan berbagai dana yang ada pada Desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh satuan negara. administratif dan sosial tingkat pusat dan daerah.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa (Musrenbangdes) Kecamatan (Musrenbangcam), Kabupaten/kota (Musrenbangda) hingga level nasional dilakukan melalui musyawarah. Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesalah pahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Desa. Musrenbang sendiri merupakan suatu bentuk forum musyawarah atau perundingan antar para pemangku kepentingan dalam suatu Desa/kampung untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan. Maka dari itu adapun kegunaan dan kepentingan Usulan Perencanaan Pembangunan yaitu untuk mengetahui dari segi-segi mana pembangunan yang dibutuhkan atau diprioritaskan dalam suatu lingkungan masyarakat disini juga agar timbulnya rasa kebersamaan antara pemerintah Kepenghuluan dengan masyarakat setempat dengan diadakan perencanaan pembangunan maka akan diminta partisipasi kepada masyarakat untuk dapat hadir dan memberikan pendapat apa saja yang menjadi prioritas dari pembangunan yang dibutuhkan.

Penyelenggaraan pembangunan di wilayah pedesaan tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut Pentingnya peran partisipasi atau keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, keyakinan dan kesadaran berasal dari dirinya sendiri, sehingga masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap wilayahnya sendiri. Sehingga upaya pembangunan desa dapat terlaksana sesuai rencana yang kita inginkan, diperlukan rencana pengembangan turunan tentang asas-asas dasar pembangunan daerah, dari, oleh, dan untuk masyarakat

Sendiri. Dampaknya adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan hal tersebut Mengidentifikasi dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di daerah tersebut dan dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk masa depan digunakan dalam kegiatan pembangunan.

Lebih lanjut dalam rangka memfokuskan pembangunan pada wilayah tertular dan tertinggal, maka kementerian desa mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sebagai regulasi teknis untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 mengatur bahwa arah kebijakan pembangunan desa didasarkan pada SDGs (Tujuan Pembangunan Desa Berkelanjutan) desa. Implementasi pembangunan berkelanjutan desa adalah mewujudkan desa bebas kemiskinan, masyarakat sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, partisipasi perempuan desa dalam pembangunan, dan akses terhadap air minum dan sanitasi, kondisi kehidupan yang layak, penggunaan energi bersih dan terbarukan, Perekonomian desa berkembang merata, desa memperbaharui infrastruktur sesuai kebutuhan, tidak ada kesenjangan sosial, situasi pembentukan desa aman dan nyaman, sadar lingkungan dalam produksi dan konsumsi, peka terhadap perubahan iklim, peduli terhadap kelautan dan darat lingkungan hidup, mewujudkan desa damai yang berkeadilan, adanya kemitraan dalam pembangunan desa dan menjaga kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif.

Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, maka pemerintah desa harus selalu berpegang pada langkah-langkah teknis dan petunjuk sesuai peraturan pemerintah, dalam hal ini Peraturan Menteri Desa tentang Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 khususnya bagian 14, khususnya 1) Pendataan desa 2) Perencanaan pembangunan desa 3) Pelaksanaan pembangunan desa dan 4) Tanggung jawab pembangunan desa. Karena hakikat pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terus menerus, yaitu kemajuan dan perbaikan menuju apa yang ingin dicapai. Dengan mencapai target SDG di tingkat desa, maka tujuan pembangunan nasional berkelanjutan yang selaras dengan tujuan SDGs dapat tercapai. Sebagaimana dikemukakan dalam (Hartoyo, 1996), pembangunan adalah suatu proses dimana anggota masyarakat terlebih dahulu mendiskusikan, merencanakan dan mengidentifikasi keinginan mereka.

Isu-isu yang terjadi dewasa ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat kampung di Papua adalah Sering terjadi keterlambatan pemberitaan kegiatan pembangunan desa; Sumber daya manusia belum optimal; Koordinasi antar bagian yang

belum optimal; Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya; Keterbatasan sarana dan prasarana; Letak geografis desa yang banyak perbukitan dan pegunungan sehingga sulit untuk dilaporkan. Kemudian, Permasalahan pembangunan desa yang muncul diantaranya adalah infrastruktur jalan desa banyak yang rusak, padahal prioritas pembangunan infrastruktur dalam pembangunan menjadi bagian yang vital dan urgen karena terkait mengenai terbukanya akses dan proses mobilitas yang akan mempermudah distribusi dan pergeseran dan pergerakan manusia dan barang yang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Kabupaten Deiyai sendiri, fokus pembangunan desa di setiap kampung-kampung diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memecahkan konektivitas mobilitas dari kampung ke kampung, dari distrik ke distrik hingga menuju ke tempat yang tergolong terpencil dan terisolir. Tujuannya adalah agar pembangunan bisa merata, tak hanya sekedar menyentuh ibu kota distrik saja, akan tetapi menyentuh semua daerah-daerah yang ada di Kabupaten Deiyai, baik yang ada di Kota Maupun pada wilayah terpencil dan terisolir. Olehnya untuk menyaksikan hal tersebut sangat dibutuhkan partisipasi atau pelibatan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pembangunan di Kabupaten Deiyai, sehingga dengan aktifnya masyarakat berpartisipasi, dapat memberdayakan mereka untuk membuka akses dan mempermudah mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Proses penyaluran barang dan jasa untuk keperluan pembangunan di kampung-kampung juga dapat terlaksana. Mengingat kondisi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Deiyai masih berada di bawah garis kemiskinan. Data BPS Deiyai Dalam Angka tahun 2022 memnunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih mencapai 40,59%, artinya bahwa hampir sebagian besar dari total jumlah penduduk masih berada atau terkatrgori sebagai masyarakat miskin. Karenanya, kebijakn-kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam program pembangunan pada tingkat kampung harusnya dapat diterjemahkan sebagai program yang memberdayakan dan dapat menstimulasi perubahan taraf hidup masyarakat yang bisa berdaya, mandiri, kreatif dan inovatif untuk dapat keluar dari jurang kemiskinan menuju keberdayaan masyarakat yang unggul sumber daya manusianya.

Salah satu sumber anggaran dari program pemberdayaan masyarakat adalah bersumber dari dana desa. Program pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa adalah inisiatif yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan alokasi anggaran langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memperkuat kelembagaan desa melalui pengelolaan anggaran yang partisipatif dan transparan.

Dana Desa digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, yang memudahkan

akses masyarakat desa ke pasar dan layanan publik serta mendukung pengembangan ekonomi desa. Program ini juga mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui pelatihan kewirausahaan, dukungan untuk UKM, dan pembentukan BUMDes, agar masyarakat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya lokal. Penguatan kelembagaan desa, seperti pemerintah desa dan lembaga adat, dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, Dana Desa mendukung pemberdayaan sosial dan lingkungan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, serta pelestarian sumber daya alam. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama, dengan pemerintah desa diwajibkan melaporkan penggunaan dana secara terbuka untuk memastikan dana digunakan sesuai perencanaan dan mencegah penyelewengan.

Olehnya artikel ini memfokuskan untuk membahas Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Kampung Oneibo Distrik Tigi Kabupaten Deiyai untuk melihat sejauh mana proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sampai pada pemerintah di tingkat kampung untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, dengan melihat program-program pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah dan program pembangunan yang sedang berjalan, serta permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan dalam pengimplementasian program pembangunan di Kampung Oneibo Distrik Tigi Kabupaten Deiyai.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Oneibo Distrik Tigi Kabupaten Deiyai dengan merujuk pada regulasi Permendesa PDPT Nomor 21 Tahun 2020 sebagai acuan dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat, serta Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengimplementasian kebijakan tersebut.

Adapun kategori informan dalam penelitian ini adalah aparat kampung sebagai pelaksana kebijakan pembangunan kampung, dan masyarakat Kampung sebagai target sasaran penyelenggaraan kebijakan pembangunan kampung. Karena pola penelusuran informan dilakukan secara *snowball* maka secara spesifik penentuan informan yang terlibat akan diketahui kemudian setelah melakukan penelitian lapangan (Moleong, 2010). Adapun secara spesifik informan yang dilibatkan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel Informan Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan
1	Melianus Pakage	Kepala Kampung
2	Herlina Pekey	Ketua PKK
3	Anton Pekey	Aparat Kampung
4	Belasius Kotouki	Masyarakat Kampung
5	Bernadus Pakage	Masyarakat Kampung

Sumber: Olah data lapangan, 2024

Tabel di atas menunjukkan daftar informan beserta pekerjaan mereka. Informan pertama, Melianus Pakage, berperan sebagai Kepala Desa. Informan kedua, Herlina Pekey, merupakan Ketua PKK, sementara Anton Pekey bekerja sebagai Aparat Kampung. Selain itu, dua informan lainnya, Belasius Kotouki dan Bernadus Pakage, berasal dari kelompok masyarakat kampung, yang berpartisipasi sebagai anggota komunitas lokal. Data yang diperoleh oleh informan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan *indepth interview*, observasi biasanya digunakan terutama untuk mengamati tingkah laku yang actual (Nasution, 2006).

Model analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan dan alur inilah yang penulis gunakan di dalam menyusun laporan penelitian yaitu Reduksi data, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahap reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Penyajian Data, penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi (Miles & Huberman, 1992).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Oneibo Distrik Tigi Kabupaten Deiyai

##### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan komponen vital dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat (Nugrogho, 2014; Winarno, 2014; Agustino, 2008). Di

Kampung Oneibo, komunikasi antar berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat umum sering kali menjadi kendala utama. Kondisi geografis yang terisolasi dan sulitnya akses jalan membuat informasi mengenai kebijakan sering kali terlambat sampai atau tidak sampai sama sekali kepada masyarakat. Hal ini menghambat proses pelaksanaan program pemberdayaan yang direncanakan oleh pemerintah daerah.

Kondisi komunikasi di kampung yang masih bergantung pada metode tradisional, di mana aparat desa harus turun langsung ke jalan dan berteriak untuk menyampaikan informasi kepada warga. Meskipun informasi yang berasal dari dalam kampung dapat diakses dengan mudah dan cepat, penyampaian informasi dari luar kampung menghadapi tantangan yang lebih besar. Hambatan ini terutama disebabkan oleh kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyebaran informasi dari luar. Hal ini mencerminkan kesenjangan akses komunikasi yang signifikan antara kampung dan dunia luar, yang dipengaruhi oleh kendala fisik dan geografis. Selain itu, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di Kampung Oneibo juga memperburuk situasi. Banyak daerah yang tidak terjangkau sinyal telepon seluler atau internet, sehingga komunikasi langsung antara pemerintah pusat atau daerah dengan masyarakat menjadi sulit. Dalam konteks ini, media komunikasi yang efektif menjadi sangat penting untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan bantuan yang tersedia bagi masyarakat. Oleh karena itu, metode komunikasi tradisional melalui pertemuan tatap muka dengan tokoh masyarakat menjadi salah satu alternatif yang diandalkan.

Pada beberapa kesempatan, pemerintah daerah telah berupaya melakukan sosialisasi kebijakan dengan mendatangi kampung-kampung terpencil seperti Oneibo. Namun, efektivitas sosialisasi ini masih kurang optimal karena tidak semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi. Informasi sering kali hanya diterima oleh segelintir tokoh adat atau pemimpin kampung, dan tidak selalu diteruskan kepada masyarakat umum. Ini menyebabkan banyak warga yang masih belum memahami tujuan dan manfaat dari program-program pemberdayaan yang diluncurkan oleh pemerintah. Ketidakefektifan komunikasi ini juga bisa dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan keterampilan atau bantuan ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup atau tepat waktu. Komunikasi yang tidak jelas juga sering menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai tujuan kebijakan, yang berpotensi menghambat pelaksanaannya.

Pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo tidak bisa diremehkan. Informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program yang ditawarkan. Di sisi lain, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada

warga juga sangat penting, karena mereka memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif, harapannya masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan yang diimplementasikan di kampung mereka. Untuk mengatasi masalah komunikasi ini, perlu adanya pendekatan yang lebih kreatif dan kontekstual, seperti pemanfaatan media lokal dan pendekatan personal. Dalam situasi tertentu, media lokal seperti radio komunitas dapat dijadikan sarana untuk menyebarkan informasi kebijakan, mengingat banyak masyarakat yang masih mendengarkan radio sebagai sumber informasi. Selain itu, dialog langsung melalui pertemuan di balai kampung atau rumah adat bisa menjadi alternatif komunikasi yang efektif di daerah yang sulit dijangkau teknologi modern.

Partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan juga sangat dipengaruhi oleh seberapa baik komunikasi yang terjadi. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, mereka cenderung merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Hal ini dapat menurunkan minat dan motivasi mereka untuk ikut serta dalam program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah, seperti pelatihan pertanian atau bantuan ekonomi. Komunikasi dua arah perlu ditingkatkan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat, kebutuhan, dan masalah mereka terkait kebijakan yang diimplementasikan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi atau musyawarah kampung yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya dialog yang terbuka, pemerintah dapat lebih memahami kondisi lapangan dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat di Kampung Oneibo. Selain itu, pendekatan komunikasi yang mempertimbangkan bahasa lokal juga penting. Mengingat banyak masyarakat di Kampung Oneibo yang menggunakan bahasa Mee sebagai bahasa sehari-hari, informasi kebijakan sebaiknya disampaikan dalam bahasa lokal agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini, tokoh adat dan pemimpin kampung dapat dilibatkan sebagai penerjemah atau fasilitator dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.

Kendala komunikasi juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat di Kampung Oneibo. Banyak warga yang belum terbiasa dengan konsep-konsep kebijakan modern atau istilah teknis yang digunakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pesan-pesan kebijakan harus disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Penggunaan media visual, seperti gambar atau video, juga dapat membantu menjelaskan program-program pemberdayaan dengan lebih efektif.

Dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang sama. Transparansi dalam penyampaian informasi kebijakan sangat penting untuk menghindari ketidakpercayaan atau kesalahpahaman. Pemerintah harus terbuka mengenai tujuan



kebijakan, prosedur pelaksanaan, dan manfaat yang akan diterima masyarakat, sehingga mereka merasa dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Kesalahan dalam komunikasi sering kali berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, bantuan yang diberikan pemerintah bisa disalahpahami sebagai bentuk bantuan tunai tanpa kewajiban, padahal sebenarnya ada kewajiban bagi penerima untuk mengikuti pelatihan atau program lain yang mendukung pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan rinci kepada masyarakat agar tidak terjadi misinterpretasi. Keberhasilan komunikasi juga dapat diukur dari seberapa besar dukungan masyarakat terhadap program-program pemberdayaan. Jika komunikasi berjalan baik, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan merasa memiliki tanggung jawab atas keberhasilan program. Sebaliknya, jika komunikasi buruk, masyarakat cenderung apatis dan tidak mendukung pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan.

Dengan demikian, komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan pemberdayaan di Kampung Oneibo memerlukan sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Pemerintah harus aktif melakukan pendekatan yang lebih inklusif, sementara tokoh masyarakat berperan sebagai penyambung lidah antara pemerintah dan warga. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Oneibo.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya adalah elemen kunci dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh sumber daya yang mencukupi, baik dari segi sumber daya manusia, dana, infrastruktur, maupun peralatan (Nugrogho, 2014; Winarno, 2014; Agustino, 2008). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan masyarakat setempat. Kampung Oneibo menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan. Sebagian besar penduduk masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami dan mengikuti program-program yang dirancang pemerintah. Pendamping masyarakat dan tenaga ahli berkompeten dibutuhkan untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi mereka, namun jumlahnya sangat terbatas.

Kurangnya tenaga ahli di bidang pemberdayaan masyarakat menjadi masalah serius. Program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan pertanian, atau usaha mikro membutuhkan pendampingan khusus dari tenaga

profesional yang memiliki keahlian di bidang-bidang tersebut. Namun, minimnya tenaga ahli yang bersedia bekerja di daerah terpencil seperti Kampung Oneibo membuat pelaksanaan program sering terhambat. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, pemerintah perlu mengadakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan aparatur desa. Melalui pelatihan ini, masyarakat akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, pelaksanaan program ini juga terkendala oleh kurangnya instruktur dan fasilitas pelatihan yang memadai di Kampung Oneibo.

Aspek lain yang sangat penting adalah ketersediaan dana. Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat memerlukan anggaran yang cukup besar, terutama untuk penyediaan fasilitas, pelatihan, dan pendampingan. Namun, keterbatasan dana sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan program di Kampung Oneibo. Pemerintah daerah sering kali mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk program-program pemberdayaan di kampung-kampung terpencil seperti Oneibo. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah distribusi anggaran yang tidak merata. Pemerintah daerah dan pusat sering kali memprioritaskan alokasi anggaran ke daerah-daerah yang lebih mudah diakses atau memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, sementara kampung-kampung terpencil seperti Oneibo mendapatkan alokasi yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan keterbatasan sumber daya untuk mendukung program pemberdayaan di kampung tersebut.

Selain dari anggaran pemerintah, program pemberdayaan masyarakat juga bisa mendapatkan dukungan dari sumber pendanaan eksternal seperti lembaga donor, NGO, atau sektor swasta. Namun, akses masyarakat Kampung Oneibo ke sumber pendanaan eksternal ini sangat terbatas. Minimnya informasi dan komunikasi membuat mereka kesulitan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak luar yang dapat mendukung program pemberdayaan mereka. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan di Kampung Oneibo. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih masih sangat minim di kampung ini. Akses jalan yang sulit dan terisolasi membuat distribusi barang, pelayanan publik, dan pelaksanaan program pemberdayaan sering kali terhambat. Tanpa infrastruktur yang memadai, masyarakat sulit untuk mengakses peluang ekonomi dan layanan dasar yang mendukung kesejahteraan mereka.

Kondisi infrastruktur yang buruk juga berdampak pada akses masyarakat terhadap pasar. Banyak produk lokal seperti hasil pertanian atau kerajinan tangan yang tidak bisa dipasarkan karena akses transportasi yang terbatas. Ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil usaha mereka, sehingga mempengaruhi keberhasilan program-program pemberdayaan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kampung Oneibo juga

masih sangat terbatas. Minimnya sekolah, guru, dan tenaga kesehatan membuat masyarakat sulit mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Hal ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia di kampung tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan.

Selain sumber daya manusia dan infrastruktur, ketersediaan peralatan dan teknologi juga sangat penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Program-program seperti pengembangan pertanian atau usaha mikro membutuhkan peralatan dan teknologi yang memadai agar dapat berjalan dengan baik. Namun, masyarakat Kampung Oneibo sering kali tidak memiliki akses terhadap peralatan dan teknologi yang dibutuhkan, sehingga program pemberdayaan tidak bisa berjalan maksimal. Dalam sektor pertanian, masyarakat Kampung Oneibo masih menggunakan teknologi tradisional yang kurang efisien. Kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern seperti mesin pertanian, pupuk, dan benih unggul membuat produktivitas pertanian mereka rendah. Padahal, pertanian adalah sektor utama yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat di kampung ini. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya di Kampung Oneibo, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga donor. Pemerintah daerah perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan dana, peralatan, dan pendampingan yang dibutuhkan masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan.

Kampung Oneibo memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti hutan, tanah subur, dan perikanan. Namun, pemanfaatan sumber daya alam ini masih belum optimal. Masyarakat belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan produktif. Pemerintah perlu mengarahkan program pemberdayaan yang fokus pada pengembangan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Perhatian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal. Tanpa keterlibatan masyarakat, program pemberdayaan tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengelola sumber daya alam secara bijaksana agar mereka dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan di Kampung Oneibo, peningkatan sumber daya manusia, dana, infrastruktur, dan teknologi sangat diperlukan. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup, meningkatkan kapasitas tenaga pendamping, menyediakan peralatan yang dibutuhkan, serta memperbaiki infrastruktur dasar. Kolaborasi dengan lembaga eksternal juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan demikian, program

pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai. Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan serta masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan Edwards III, disposisi merujuk pada bagaimana sikap dan pemahaman pelaksana kebijakan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program-program yang direncanakan (Nugrogho, 2014; Winarno, 2014; Agustino, 2008). Disposisi pemerintah daerah berperan krusial dalam menentukan arah dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Jika aparat pemerintah di tingkat lokal memiliki komitmen yang kuat dan pandangan positif terhadap kebijakan pemberdayaan, maka program tersebut kemungkinan besar akan dijalankan dengan baik. Namun, di Kampung Oneibo, terdapat kecenderungan aparat pemerintah lokal yang kurang termotivasi, terutama karena kondisi kerja yang menantang di wilayah terpencil dan minimnya insentif.

Pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen tinggi terhadap program-program pemberdayaan akan berusaha menjalankan tugas mereka dengan baik meski menghadapi berbagai keterbatasan. Selain komitmen, sikap para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan pemberdayaan juga memainkan peran penting. Sikap yang positif dan proaktif akan mendorong pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif. Di sisi lain, jika pelaksana kebijakan tidak percaya pada efektivitas kebijakan tersebut atau merasa bahwa kebijakan tidak relevan dengan kondisi lokal, mereka cenderung tidak menjalankannya dengan sepenuh hati. Hal ini dapat menyebabkan program-program pemberdayaan tidak berjalan optimal. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya tergantung pada pejabat di tingkat atas, tetapi juga pada aparatur yang bekerja di lapangan. Aparatur yang memiliki pemahaman mendalam tentang program pemberdayaan serta memiliki sikap proaktif dalam menjalankan tugas mereka cenderung berhasil membawa perubahan di masyarakat. Sebaliknya, aparatur yang kurang termotivasi atau merasa tidak memiliki peran penting akan membuat pelaksanaan program tidak berjalan maksimal.

Agar disposisi pelaksana kebijakan lebih positif, pelatihan mengenai pentingnya program pemberdayaan dan dampaknya terhadap masyarakat perlu diberikan secara berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaksana kebijakan, baik di tingkat daerah maupun di lapangan, tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka. Insentif yang memadai bagi para pelaksana kebijakan dapat meningkatkan motivasi dan disposisi mereka dalam menjalankan tugas.

Komitmen dan sikap positif aparat desa dalam membangun kampung meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang yang minim. Mereka tetap berupaya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Namun, untuk meningkatkan keterampilan aparat desa, dibutuhkan pelatihan yang memadai serta dukungan sarana penunjang agar menunjukkan keseriusan dalam tugas mereka. Selain itu Kampung Oneibo, kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya fasilitas kerja sering kali menyebabkan pelaksana kebijakan merasa tidak didukung. Dengan memberikan insentif yang sesuai, seperti tunjangan tambahan atau fasilitas kerja yang memadai, diharapkan disposisi pelaksana kebijakan dapat lebih positif dan berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

Sikap aparat pemerintah dalam melayani masyarakat juga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Aparat yang responsif, ramah, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat akan membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Namun, jika aparat bersikap sebaliknya, kurang peduli atau tidak merespons keluhan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan yang dapat menghambat pelaksanaan program pemberdayaan. Pelaksana kebijakan yang memiliki disposisi positif biasanya akan proaktif dalam melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Sebaliknya, jika mereka tidak memiliki komitmen yang kuat, pelaporan dan evaluasi bisa saja diabaikan atau tidak dilakukan secara objektif. Hal ini bisa menyebabkan program tidak mendapatkan masukan yang tepat untuk perbaikan di masa mendatang.

Beragamnya tanggapan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dijalankan. Sebagian masyarakat menyikapinya dengan positif, karena jenis bantuan yang diberikan dinilai memudahkan dan bermanfaat dalam mengembangkan usaha kelompok, yang hasilnya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga disalurkan untuk kegiatan sosial, seperti mendukung kedukaan dan memberikan sumbangan. Kelompok ini melihat adanya potensi dari program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan secara kolektif. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang bersikap pesimis, merasa bahwa program ini tidak dikelola dengan serius dan hanya dilakukan secara formalitas. Mereka berpendapat bahwa program ini tidak benar-benar memberikan dampak jangka panjang dalam peningkatan keterampilan atau kapasitas masyarakat. Bantuan yang diberikan cenderung berbentuk tunai dan tidak disertai dengan pengembangan kemampuan yang berkelanjutan, sehingga dampaknya tidak signifikan dan kondisi masyarakat tetap stagnan. Ketidakpuasan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan terhadap efektivitas program pemberdayaan, di mana sebagian merasa terbantu, sementara yang lain merasa program ini kurang tepat sasaran dan tidak membawa perubahan berarti.

Disposisi yang positif, baik dari pemerintah maupun masyarakat, akan berdampak langsung pada keberhasilan kebijakan pemberdayaan. Ketika seluruh pihak yang terlibat memiliki sikap yang mendukung dan komitmen yang tinggi, program-program yang dijalankan akan lebih mudah mencapai tujuan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat akan meningkat, dan kebijakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Untuk meningkatkan disposisi positif dalam implementasi kebijakan di Kampung Oneibo, diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal komunikasi, pelatihan, dan pemberian insentif bagi para pelaksana kebijakan. Selain itu, pemerintah perlu membangun hubungan yang lebih baik dengan tokoh masyarakat dan adat untuk memastikan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan disposisi yang positif, implementasi kebijakan pemberdayaan di Kampung Oneibo akan berjalan lebih lancar dan menghasilkan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan program. Struktur ini mengacu pada tata kelola dan hirarki kelembagaan yang mengatur pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal hingga nasional. Birokrasi yang efektif dapat memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan, sedangkan birokrasi yang kaku dan tidak efisien justru dapat menjadi hambatan dalam implementasi (Nugrogho, 2014; Winarno, 2014; Agustino, 2008). Di Kampung Oneibo, struktur birokrasi dimulai dari pemerintah desa yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Kepala desa, aparat desa, dan perangkat lainnya memiliki kewajiban untuk menerjemahkan kebijakan pemberdayaan dari pemerintah pusat atau daerah ke dalam aksi nyata. Namun, hirarki ini kadang terhambat oleh minimnya pemahaman dan kapasitas aparatur desa.

Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Deiyai, memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di Kampung Oneibo. Mereka berperan sebagai perantara antara pemerintah pusat dan desa, memastikan bahwa alokasi anggaran dan instruksi kebijakan disalurkan dengan baik. Namun, terkadang birokrasi di tingkat kabupaten masih lambat, terutama dalam hal pencairan dana dan pengiriman dukungan teknis. Distrik Tigi, sebagai wilayah administratif di atas kampung, memiliki peran koordinatif. Kepala distrik dan stafnya bertugas mengawasi beberapa kampung, termasuk Oneibo, dalam menjalankan program-program pemberdayaan. Namun, struktur birokrasi di tingkat distrik sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi dengan aparatur kampung, sehingga kebijakan tidak diterapkan secara konsisten.

Salah satu masalah utama dalam struktur birokrasi di Kampung Oneibo adalah keterbatasan kapasitas dari aparat pemerintah. Banyak dari mereka tidak memiliki

pelatihan atau pendidikan yang cukup untuk memahami kebijakan secara mendalam dan menerapkannya dengan benar. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan interpretasi kebijakan dan pelaksanaan yang tidak efektif. Struktur birokrasi yang terlalu kaku menjadi hambatan lain dalam implementasi kebijakan di Kampung Oneibo. Setiap keputusan harus melalui prosedur yang panjang dan berjenjang, mulai dari desa, distrik, hingga kabupaten. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan program pemberdayaan di lapangan.

Struktur birokrasi yang lambat sering kali berdampak pada keterlambatan distribusi dana untuk program-program pemberdayaan. Prosedur pencairan dana yang memerlukan persetujuan dari berbagai tingkatan membuat anggaran tidak turun tepat waktu, sehingga program-program yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan sesuai jadwal. Hal ini memperlambat upaya pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo. Struktur birokrasi yang ada saat ini sering kali lemah dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Di Kampung Oneibo, sulit untuk memastikan apakah dana dan program pemberdayaan digunakan sesuai peruntukannya, karena minimnya pengawasan dari tingkat yang lebih tinggi. Sistem pelaporan yang tidak teratur juga menyebabkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan.

Birokrasi yang kaku sering kali menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Masyarakat di Kampung Oneibo mungkin merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan pemerintah karena prosedur yang rumit dan panjang. Hal ini menyebabkan kebijakan pemberdayaan yang seharusnya melibatkan masyarakat menjadi kurang efektif karena keterlibatan masyarakat yang minim. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di Kampung Oneibo, perlu dilakukan reformasi birokrasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyederhanakan prosedur administrasi sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, perlu ada pelatihan bagi aparat pemerintah agar mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Secara berkala perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur birokrasi yang ada di Kampung Oneibo. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem birokrasi serta mengusulkan perbaikan yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi yang konsisten, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa birokrasi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan di kampung-kampung terpencil seperti Oneibo. Reformasi yang tepat dan berkelanjutan dalam birokrasi akan memastikan kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan, tetapi juga mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang efektif dan inklusif.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Oneibo Distrik Tigi Kabupaten Deiyai**

## 1. Faktor Pendukung

Komitmen Pemerintah Daerah, Komitmen dari pemerintah daerah menjadi faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah yang memiliki tekad kuat untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terpencil, seperti Kampung Oneibo, akan berupaya sebaik mungkin untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan. Komitmen ini biasanya diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran, penyediaan infrastruktur dasar, serta kebijakan pendampingan. Dukungan Kebijakan Pusat, Selain komitmen dari pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah pusat juga memainkan peran penting. Kebijakan pusat yang mendukung program-program pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil, seperti Dana Desa, sangat membantu dalam menggerakkan program tersebut di level lokal. Pemerintah pusat seringkali menyediakan dana serta panduan kebijakan yang memungkinkan daerah untuk melaksanakan program secara lebih efisien.

Partisipasi Aktif Masyarakat, Keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan sangat krusial. Masyarakat yang aktif terlibat dalam program akan lebih memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut, sehingga keberlanjutan dan keberhasilan program akan lebih terjamin. Partisipasi dapat berupa kontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Kearifan Lokal dan Budaya Gotong Royong, Kampung Oneibo dan daerah sekitarnya kaya dengan kearifan lokal yang dapat mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Tradisi gotong royong, misalnya, dapat digunakan sebagai modal sosial yang memperkuat kebersamaan masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan. Budaya ini juga mendorong solidaritas sosial yang membantu dalam menghadapi tantangan bersama.

Adanya Potensi Sumber Daya Alam, Keberadaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini, seperti tanah yang subur untuk pertanian dan kekayaan alam lainnya, memberikan peluang besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program pemberdayaan yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Dukungan dari Lembaga Non-Pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pembangunan sosial-ekonomi seringkali turut mendukung program pemberdayaan. Di banyak daerah, kehadiran LSM ini mampu melengkapi apa yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah, terutama dalam hal pelatihan keterampilan dan pendampingan teknis. Di Kampung Oneibo, dukungan dari lembaga-lembaga ini sangat bermanfaat.

Keberadaan Program Pelatihan, Pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun lembaga swasta menjadi faktor pendukung lainnya. Masyarakat perlu dibekali keterampilan agar dapat mandiri secara ekonomi. Pelatihan seperti pengelolaan usaha kecil, pertanian modern, ataupun keterampilan teknis lain dapat



meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan pembangunan. Kemitraan dengan Sektor Swasta, Keterlibatan sektor swasta dalam program pemberdayaan masyarakat juga memberikan dukungan yang signifikan. Perusahaan yang beroperasi di sekitar Kampung Oneibo, misalnya, dapat terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama dengan sektor swasta ini bisa berupa bantuan teknologi, investasi, atau pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Infrastruktur Penunjang yang Memadai, Meskipun tidak selalu tersedia dengan sempurna, adanya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih sangat mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Akses terhadap infrastruktur ini memungkinkan distribusi bantuan, pelaksanaan pelatihan, serta pengembangan usaha masyarakat bisa berjalan dengan lebih lancar. Tanpa infrastruktur yang memadai, program pemberdayaan akan lebih sulit terlaksana. Kepemimpinan Lokal yang Kuat, Pemimpin lokal, seperti kepala desa atau tokoh masyarakat, memiliki peran kunci dalam mendorong implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan yang kuat dan visioner akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pemberdayaan. Pemimpin yang peduli dan dekat dengan warganya mampu memotivasi dan mengarahkan sumber daya lokal untuk mencapai hasil yang optimal.

## **2. Faktor Penghambat**

Keterbatasan Infrastruktur, Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo adalah minimnya infrastruktur yang memadai. Jalan yang rusak atau tidak layak, keterbatasan akses komunikasi, dan fasilitas umum yang kurang memadai dapat mempersulit pelaksanaan program-program pemberdayaan. Infrastruktur yang terbatas menyebabkan kesulitan dalam mendistribusikan bantuan, menyediakan pelatihan, atau mendukung pengembangan ekonomi lokal. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih, Di daerah terpencil seperti Kampung Oneibo, seringkali terjadi kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai untuk mendukung program pemberdayaan. Banyak masyarakat yang masih kurang terlatih dalam bidang tertentu, seperti pengelolaan usaha, teknologi, dan manajemen. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan menjadi tidak optimal karena masyarakat tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka.

Kurangnya Dukungan Finansial, Meskipun ada program pemerintah seperti Dana Desa, alokasi anggaran yang tersedia seringkali tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan secara menyeluruh. Selain itu, penyaluran dana sering mengalami keterlambatan, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Ketergantungan pada sumber pendanaan tunggal juga menjadi

salah satu faktor yang membuat program-program pemberdayaan kurang berkelanjutan. Birokrasi yang Kompleks dan Lambat, Proses administrasi yang rumit dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan menjadi hambatan lain yang sering dihadapi. Birokrasi yang berbelit-belit dalam pengajuan bantuan, laporan pertanggungjawaban, serta verifikasi program seringkali memperlambat implementasi kebijakan. Kompleksitas ini menyebabkan banyak program pemberdayaan tidak dapat berjalan tepat waktu atau bahkan tidak terealisasi.

Kendala Geografis, Kampung Oneibo terletak di wilayah yang cukup terpencil dengan kondisi geografis yang menantang. Hal ini dapat mempersulit akses transportasi, terutama untuk distribusi bantuan atau pelaksanaan pelatihan. Jarak yang jauh dan sulitnya akses ke pasar serta pusat pemerintahan membuat masyarakat setempat mengalami keterbatasan dalam menjual produk mereka atau mendapatkan layanan dasar lainnya. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi yang Efektif, Salah satu penghambat utama lainnya adalah kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap program pemberdayaan yang telah dijalankan. Tanpa monitoring yang baik, sulit untuk menilai apakah program berjalan sesuai dengan rencana atau memberikan dampak yang diharapkan. Evaluasi yang tidak rutin juga membuat kebijakan sulit untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Tingkat Pendidikan yang Rendah, Tingkat pendidikan yang rendah di Kampung Oneibo menjadi faktor penghambat yang signifikan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah biasanya kurang mampu untuk mengikuti program pelatihan atau memahami kebijakan yang ditawarkan. Selain itu, pendidikan yang terbatas juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam atau menjalankan usaha produktif yang lebih kompleks. Ketidakpastian Keamanan, Di beberapa wilayah di Papua, termasuk Kabupaten Deiyai, situasi keamanan yang tidak stabil kadang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Gangguan keamanan seperti konflik antar-kelompok atau ketegangan politik dapat membuat pelaksanaan program pemberdayaan tertunda atau tidak berjalan sesuai dengan rencana.

### **3.3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berbagai inisiatif dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan program ini, termasuk pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap sumber daya dan teknologi, serta penguatan

kelembagaan masyarakat. Pemberdayaan yang efektif juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembang.

Dalam rangka memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat, perencanaan yang komprehensif dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci utama. Pemerintah melalui instansi terkait, seperti dinas sosial dan pembangunan desa, berperan dalam menyediakan panduan, regulasi, serta bantuan pendanaan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendekatan yang partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan hingga implementasi program. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program pemberdayaan menjadi lebih relevan dan mampu menjawab kebutuhan nyata yang ada di lapangan, sehingga dampaknya pun lebih berkelanjutan.

Upaya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu langkah strategis dalam program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan di kampung. Berdasarkan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Chambers (1994), keberhasilan pemberdayaan dapat diukur melalui lima indikator utama: (1) akses terhadap sumber daya, (2) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (3) peningkatan kapasitas, (4) rasa kepemilikan, dan (5) keberlanjutan. Musrenbang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, memenuhi indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung.

Indikator pertama, yaitu akses terhadap sumber daya, terlihat dalam bagaimana Musrenbang menjadi sarana untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat terkait sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan. Dengan masyarakat terlibat dalam Musrenbang, mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik di kampung mereka, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, atau infrastruktur dasar lainnya. Selain itu, melalui Musrenbang, pemerintah dapat memfasilitasi akses masyarakat terhadap dana pembangunan dan bantuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan program pemberdayaan. Hal ini penting karena salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya. Selanjutnya, indikator kedua terkait dengan partisipasi aktif masyarakat. Proses Musrenbang memastikan bahwa masyarakat di Kampung Oneibo terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Tingginya tingkat partisipasi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap proses pembangunan yang sedang dijalankan. Keterlibatan langsung mereka

memperkuat posisi masyarakat dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap hasil dari program-program tersebut. Dengan demikian, partisipasi aktif ini berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan yang relevan dan tepat sasaran.

Indikator ketiga adalah peningkatan kapasitas. Melalui keterlibatan dalam Musrenbang, masyarakat juga memperoleh pengalaman dalam berorganisasi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Proses ini menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami mekanisme pemerintahan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, kearifan lokal yang ada di Kampung Oneibo, seperti kebersamaan dan solidaritas, menjadi modal sosial yang sangat kuat dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Modal sosial ini membantu masyarakat bekerja sama dengan pemerintah serta lembaga lainnya untuk menjalankan dan mengawasi program pemberdayaan dengan lebih efektif. Rasa kepemilikan yang muncul dari partisipasi masyarakat dalam Musrenbang juga memainkan peran penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Ketika masyarakat merasa terlibat dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap hasil dari program tersebut. Rasa kepemilikan ini juga memperkuat motivasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan program dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Ini menjadi sangat penting karena program pemberdayaan yang berhasil adalah program yang bukan hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.

Terkait dengan keberlanjutan, Musrenbang berperan penting dalam membangun fondasi keberlanjutan program pemberdayaan. Dengan adanya partisipasi aktif, akses terhadap sumber daya, dan peningkatan kapasitas masyarakat, program-program yang dihasilkan melalui Musrenbang lebih mungkin untuk berkelanjutan. Rasa kebersamaan dan modal sosial yang ada di Kampung Oneibo menjadi faktor pendukung tambahan yang memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan. Dengan dukungan pemerintah dan keterlibatan masyarakat, program pemberdayaan dapat berlangsung secara terus-menerus, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan, serta membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Upaya pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat di Kampung Oneibo dapat dianalisis dengan mengaitkannya pada indikator pemberdayaan masyarakat menurut Robert Chambers (1994). Chambers (1994) menekankan bahwa pemberdayaan harus fokus pada akses sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas, kesetaraan, serta kontrol lokal terhadap sumber daya dan proyek pembangunan. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan lembaga swasta untuk masyarakat Kampung Oneibo seperti keterampilan pertanian modern, manajemen usaha kecil, dan peningkatan kemampuan ekonomi adalah langkah konkret yang sesuai dengan

prinsip-prinsip ini. *Pertama*, akses terhadap sumber daya menjadi kunci dalam pemberdayaan. Dengan memberikan pelatihan keterampilan teknis, masyarakat dibekali dengan pengetahuan untuk mengelola sumber daya lokal yang mereka miliki, seperti tanah dan hasil pertanian. Pelatihan pertanian modern memungkinkan petani lokal untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka dengan menggunakan teknik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ini memperbaiki akses masyarakat terhadap hasil bumi, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Dengan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya, masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.

*Kedua*, indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan juga tercermin dalam upaya pelatihan ini. Program pelatihan tidak hanya memberi masyarakat keterampilan teknis, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan implementasi program. Melalui musyawarah desa dan forum-forum partisipatif lainnya, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan mereka dan memilih jenis pelatihan yang paling sesuai dengan potensi lokal. Partisipasi aktif ini penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga masyarakat memiliki kontrol lebih besar terhadap arah pembangunan di wilayah mereka. *Ketiga*, pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, salah satu indikator utama pemberdayaan menurut Chambers (1994). Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, masyarakat menjadi lebih mampu untuk mengelola usaha kecil dan menengah serta memanfaatkan potensi lokal seperti hasil pertanian atau kerajinan. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya membantu masyarakat untuk mengelola ekonomi keluarga mereka sendiri, tetapi juga memperkuat daya saing komunitas secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang lebih luas. Pelatihan ini mendorong inovasi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang pada akhirnya membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kampung Oneibo.

*Keempat*, upaya pelatihan ini juga memperhatikan aspek kesetaraan dan inklusi sosial, indikator yang ditekankan oleh Chambers (1994). Program pelatihan ini diupayakan untuk melibatkan semua kelompok dalam masyarakat, termasuk perempuan, yang sering kali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial. Dengan memberikan akses yang setara kepada kelompok-kelompok marjinal, program pelatihan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesetaraan dalam akses pendidikan dan keterampilan merupakan langkah awal menuju pemberdayaan yang lebih inklusif dan adil. Terakhir, pelatihan ini juga mendukung kontrol lokal atas sumber daya dan proyek pembangunan. Masyarakat yang telah dilatih memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengelola proyek pembangunan di kampung mereka, termasuk usaha-usaha kecil dan pemanfaatan hasil pertanian. Dengan adanya keterampilan yang lebih baik, masyarakat Kampung

Oneibo tidak hanya menjadi penerima manfaat dari proyek pembangunan, tetapi juga mampu mengontrol dan mengarahkan proyek tersebut agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan lokal. Ini memperkuat posisi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka dan memastikan bahwa program-program pemberdayaan berjalan sesuai dengan aspirasi lokal.

Upaya perbaikan infrastruktur di Kampung Oneibo, terutama dalam membangun jalan, jembatan, listrik, dan jaringan komunikasi, merupakan langkah penting yang dapat dianalisis menggunakan indikator pemberdayaan masyarakat menurut Robert Chambers (1994). Infrastruktur dasar yang memadai sangat berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, partisipasi masyarakat, kapasitas lokal, kesetaraan, dan kontrol masyarakat atas pembangunan. Dalam konteks Kampung Oneibo, keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan, sehingga upaya ini perlu diperkuat untuk mendukung pemberdayaan yang berkelanjutan. *Pertama*, akses terhadap sumber daya adalah indikator kunci dalam pemberdayaan. Infrastruktur yang buruk, seperti jalan rusak dan minimnya listrik serta komunikasi, membatasi akses masyarakat ke sumber daya penting, seperti pasar dan layanan publik. Dengan perbaikan jalan dan jembatan, masyarakat Kampung Oneibo akan lebih mudah mendistribusikan hasil pertanian mereka dan mengakses barang serta jasa dari luar kampung. Ini mempercepat aliran ekonomi lokal dan memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya mereka secara lebih efektif. Perbaikan infrastruktur juga membuka akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih besar, sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang.

*Kedua*, perbaikan infrastruktur ini juga mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan jaringan komunikasi yang baik, memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pertemuan, pelatihan, dan kegiatan komunitas. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi yang lebih tinggi akan memperkuat peran masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga program pemberdayaan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Infrastruktur yang baik memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat setempat. *Ketiga*, upaya memperbaiki infrastruktur juga secara langsung mendukung peningkatan kapasitas lokal, yang menjadi indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat menurut Chambers (1994). Akses jalan yang baik memudahkan pelaksanaan program pelatihan, baik yang terkait dengan pertanian modern, manajemen usaha, atau keterampilan teknis lainnya. Infrastruktur komunikasi yang lebih baik memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi ke masyarakat lokal dengan lebih efisien. Dengan peningkatan kapasitas ini, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan program-program pembangunan, serta mengembangkan usaha kecil mereka secara lebih efektif.

*Keempat*, kesetaraan dan inklusi sosial juga didorong oleh perbaikan infrastruktur. Akses jalan dan listrik yang merata ke seluruh kampung memungkinkan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti perempuan, lansia, dan kelompok masyarakat miskin, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial secara lebih luas. Keterbukaan akses ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari program pemberdayaan. Dengan akses yang lebih mudah, mereka dapat berpartisipasi dalam pelatihan, mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, dan terhubung dengan peluang ekonomi baru. Terakhir, infrastruktur yang lebih baik memperkuat kontrol lokal atas proyek-proyek pembangunan. Dengan perbaikan jalan dan komunikasi, masyarakat Kampung Oneibo dapat lebih aktif dalam mengelola proyek pemberdayaan yang sedang berjalan, seperti usaha pertanian atau proyek pembangunan desa. Infrastruktur yang memadai memungkinkan mereka untuk mengawasi pelaksanaan program secara lebih efektif dan memastikan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini juga memberi masyarakat kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik tentang alokasi sumber daya dan prioritas pembangunan, sehingga kontrol atas program pemberdayaan lebih berada di tangan masyarakat lokal, sejalan dengan prinsip yang diajukan oleh Chambers (1994).

Upaya untuk memanfaatkan potensi besar di bidang pertanian dan perikanan di Kampung Oneibo dapat dianalisis menggunakan indikator pemberdayaan masyarakat menurut Robert Chambers (1994). Chambers (1994) menekankan bahwa pemberdayaan harus melibatkan akses terhadap sumber daya, peningkatan kapasitas lokal, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kesetaraan, dan kontrol lokal terhadap proyek pembangunan. Program pemberdayaan yang difokuskan pada pengelolaan hasil pertanian dan perikanan di Danau Tigi menunjukkan upaya strategis untuk memastikan bahwa masyarakat mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan produktif. *Pertama*, akses terhadap sumber daya merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat menurut Chambers (1994). Dengan memberikan pendampingan teknis dan modal kepada masyarakat Kampung Oneibo, pemerintah memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang lebih baik terhadap alat-alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola pertanian dan perikanan mereka. Modal ini membantu mereka untuk mengembangkan usaha tani dan perikanan mereka secara lebih produktif, sementara pendampingan teknis memungkinkan penerapan praktik berkelanjutan yang meningkatkan hasil tanpa merusak lingkungan. Dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya ini, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

*Kedua*, peningkatan kapasitas lokal adalah indikator penting dalam pemberdayaan. Pendampingan teknis yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola pertanian dan perikanan



dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang lebih efektif, mengurangi ketergantungan pada metode tradisional yang kurang produktif, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar. Dengan keterampilan yang lebih baik, masyarakat juga dapat menambah nilai produk mereka, seperti melalui pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi produk bernilai tinggi. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dari upaya ini. Pemerintah tidak hanya menyediakan modal dan pendampingan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sumber daya alam ini. Dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan jenis bantuan teknis yang mereka butuhkan dan cara pengelolaan Danau Tigi yang paling efektif, program pemberdayaan ini memastikan bahwa masyarakat memiliki kontrol lebih besar atas arah pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri. Partisipasi ini penting agar program dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

*Keempat*, upaya ini juga memperhatikan kesetaraan dan inklusi sosial. Pendampingan teknis dan modal yang diberikan oleh pemerintah diarahkan untuk menjangkau semua kelompok dalam masyarakat, termasuk kelompok yang sering kali kurang terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti perempuan dan kaum muda. Dengan memberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan pelatihan, program ini memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari potensi pertanian dan perikanan yang ada di Danau Tigi. Kesetaraan ini penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya. Terakhir, kontrol lokal atas proyek pembangunan adalah aspek penting lainnya yang ditekankan oleh Chambers (1994). Melalui pendampingan teknis dan modal, masyarakat Kampung Oneibo mendapatkan kontrol yang lebih besar atas pengelolaan sumber daya alam mereka. Ini memungkinkan mereka untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga untuk secara aktif mengelola dan mengarahkan penggunaan sumber daya alam mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa pengelolaan Danau Tigi dan lahan pertanian dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk keuntungan jangka pendek tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan bagi generasi mendatang.

#### 4. SIMPULAN

Pemanfaatan Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang mengidentifikasi empat faktor utama—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, dapat disimpulkan; *Pertama*, Komunikasi. Dalam konteks Kampung Oneibo, komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat sangat penting untuk memastikan program pemberdayaan berjalan dengan baik. Hambatan komunikasi, seperti akses informasi yang terbatas dan



kurangnya transparansi dalam penyampaian program, dapat memperlambat proses implementasi. Meski demikian, apabila komunikasi yang lebih terbuka dan terarah dapat dijalankan, masyarakat akan lebih paham dan terlibat dalam program pemberdayaan yang dirancang untuk mereka. *Kedua*, Sumber Daya. Ketersediaan sumber daya, baik itu dana, infrastruktur, maupun sumber daya manusia yang memadai, menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan di Kampung Oneibo. Sumber daya alam yang ada sebenarnya cukup potensial untuk dimanfaatkan, namun kekurangan pelatihan dan keterampilan masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur, menjadi penghambat utama. Selain itu, kurangnya alokasi dana yang cukup dan tepat waktu dari pemerintah sering kali menyebabkan program tidak berjalan optimal. *Ketiga*, Disposisi (Sikap) Pelaksana. Sikap dan komitmen dari pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan, baik pemerintah maupun masyarakat, memainkan peran kunci. Di Kampung Oneibo, kesadaran dan partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dalam beberapa program pemberdayaan, yang bisa menjadi penghalang implementasi. Namun, dengan adanya pemimpin lokal yang kuat dan dukungan sosial dari tokoh masyarakat, sikap positif terhadap pemberdayaan dapat ditingkatkan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat. *Keempat*, Struktur Birokrasi. Birokrasi yang kompleks dan sering kali tidak efisien menjadi salah satu penghambat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan di daerah ini. Proses yang rumit dan panjang dalam administrasi serta koordinasi antar lembaga sering kali memperlambat pelaksanaan program. Jika struktur birokrasi dapat disederhanakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan diperbaiki, implementasi kebijakan akan lebih lancar dan efektif.

*Kelima*, Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo memiliki peluang yang baik karena dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan potensi sumber daya alam. Namun, faktor penghambat seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas SDM, birokrasi yang rumit, dan kurangnya akses informasi harus diatasi untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi dan mengatasi hambatan yang ada. *Keenam*, Upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat di Kampung Oneibo melalui program pelatihan keterampilan, perbaikan infrastruktur, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam memiliki implikasi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui mekanisme Musrenbang, program ini berhasil memenuhi indikator pemberdayaan yang dikemukakan oleh Robert Chambers (1994), yaitu akses terhadap sumber daya, peningkatan kapasitas lokal, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kesetaraan, dan kontrol lokal. Pendampingan teknis dan modal yang diberikan oleh pemerintah memastikan masyarakat memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola pertanian dan perikanan secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, program pemberdayaan ini dapat berjalan lebih efektif, relevan, dan mampu memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat Kampung Oneibo.

## REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- BPS. (2023). *Kabupaten Deiyai dalam Angka Tahun 2022*. BPS Kabupaten Deiyai.
- Chambers, R. (1994). *Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience*. World Development, 22(9), 1253-1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Hartoyo. (1996). *Buku Materi pokok konsep pembangunan masyarakat desa*. Jakarta: Karunika universitas Terbuka.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh. Tjetjep Rohendi Rohidi. (1992). Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. S. (2006). *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Desa tentang Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.